BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi atau pengangkutan merupakan salah satu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil dan besar, perairan yang pada umumnya meliputi laut, sungai dan danau yang memungkinkan dilakukan pengangkutan melalui darat, air, dan udara untuk menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.¹

Pada rangkaian teknologi sekarang kebutuhan kendaraan bermotor sangat tinggi namun disisi lain tidak ada lagi penyeimbang dalam inovasi terhadap kebutuhan dasar wujud baik sarana maupun prasarana, yang membuat ketidakproporsional pada kendaraan dengan area parkir yang ada. Seterusnya menjadi sebuah petunjuk utama dalam kemunculan terjadinya beragam permasalahan misalnya kemacetan dan kebutuhan area parkir sebagai tersedianya kendaraan yang bebarangan dengan naiknya kebutuhan masyarakat umum akan konsumsi kendaraan. Proses penyelenggaraan parkir didayagunakan oleh pemerintah dengan penggunaan tanah milik pemerintah dapat dikatakan sebagai pengguna jasa parkir ataupun pelaku usaha yang memiliki usaha parkir dalam artian memiliki lahan area parkir untuk usaha bisa dikatakan pengendara yang

¹ Muhammad, Abdulkari 1998. **Hukum Pengkutan Niaga** (Bandung, Citra Aditya Bakti) Hlm. 7

memarkitkan kendaraan dilahan milik swasta disebut konsumen. Peluang terhadap pemanfaat dalam bidang usaha perparkiran dalam artian perwujudan sebenarnya dalam menyediakan jasa.² Memuat parkir ada dua pihak yaitu pelaku usaha serta konsumen atau pihak masyarakat sebagai jasa parkir. Pengadaian misalkan dengan tempat seperti gedung serba guna yang menjual segala barang kebutuhan, maka keberadaan akan kegiatan parkir mempunyai kondisi yang bagus, sebagaimana bangunan bergendung dan area lainnya memiliki area yang luas untuk keebutuhan parkir yang berdampak positif bagi peluang pengelola parkir.

Pengertian parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.³ Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu keadaa yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan permintaan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat. Pada kondisi tertentu, kemudian akan terjadi penambahan permintaan apabila tidak diikuti penambahan ruang parkir dapat menimbulkan masalah. Hal ini harus diatasi dengan menerapkan konsep manajemen parkir secara tidak baik. Pada kenyataannya masalah parkir kini telah bertumbuh menjadi isu yang serius, yang terjadi karena dorongan urbanisasi, pesatnya tingkai

² David M.I. Tobing, 2007. **Hukum Pelindungan Konsumen Dan Parkir**, (Jakarta :Timpani) hlm. 5

³ **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, hlm.12

pertumbuhan kendaraan dan tekanan dari pabrikasi produsen kendaraan bermotor. Kondisi parkir diperparah dengan masalah parkir ilegal yang masih banyak muncul di banyak tempat. Kebijakan manajemen parkir harus berperan kuat dalam menyusun strategi untuk memperbaiki mobilitas perkotaan di Indonesia.⁴

Melihat disudut pandang lain bahwa pemilik lahan parkir juga termasuk usaha jangka panjang dalam meraih *benefit* cukup banyak, diluar itu banyak tuntutan segala macam sudut pandang untuk standarisasi bagi petugas parkir dalam kegiatan untuk memberikan pelayanan jasa terbaik yaitu persoalan keamanan pada kendaraan beserta barangnya yang berada di daerah parkir.

Penitipan barang ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan adanya, merujuk kearah kerusakan atau kehilangan, sehingga memunculkan tanggung jawab bagi orang yang dipercayakan. Garis besarnya keberadaan titipan yang ada kepada petugas memunculkan penerima titipan setidaknya bertanggung jawab. Sehingga ketika terjadi sesuatu kerusakan pada barang atau yang hilang, maka jelas hal tersebut menjadi tanggung jawab sipenerima titipan.

Tempat parkir memiliki peranan penting terhadap kepemilikan kendaraan masyarakat yang ingin memarkirkan kendaraannya. Akan tetapi penggunaan klausula baku masih saja digunakan dalam praktik penyelenggaraan jasa perparkiran atau disebut "*Klausula Eksonerasi*" yang

⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional , 2015, **Manajemen Parkir Di Perkotaan, Jakarta** ,Hlm. 9

penerapannya terdapat unsur pengalih tanggung jawab yang seolah diuntungkan oleh pelaku usaha yang diuraikan dalam bentuk tiket tanda karcis dan itupun konsumen wajib mematuhi. Kata-kata klausula yang bisa ditampilkan dalam bentuk tulisan di kertas ataupun papan area parkir berbunyi: "*Tidak bertanggungjawab atas munculnya hal-hal yang berkaitan dengan keadaan yang terjadi di area parkir yaitu kehilangan atau rusaknya barang*". Diatur berkaitan dengan isi dari karcis dijelaskan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang berakibat adanya berkemungkinan adanya pengalihan tanggung jawab yang berbunyi:

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila mengatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha".

Penguraian di Pasal 18 ayat (1) memperlihatkan "pelarangan memunculkan maksud menposisikan tinggi rendahnya konsumen sejajar dengan pelaku usaha didasari wujudnya kebebasan berkontrak". Perwujudan hak dari konsumen diuraikan didalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa:

"berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa".

Sudah mulai menampakkan uraian pasal 4 memunculkan secara matang wujud hak yang diterima dalam pembahasan perihal jasa pelayanan yang

ditangkap konsumen ke petugas parkir perihal barang atau kendaraan yang diamankan di area parkir.

Peraturan Daerah kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 tentang pelayanan ditepi jalan umum " Bahwa dalam upaya meningkatkan kepada masyarakat di bidang perparkiran guna terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas maka perlu dipungut retribusi parkir bagi kendaraan yang memanfaatkan badan jalan yang disediakan pemerintah kota sebagai pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 36 huruf e Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 64 tahun 2023 menyatakan bahwa" mendapatkan ganti rugi atas kehilangan barang secara utuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 39 ayat (1) Peraturan wali kota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023 menyatakan bahwa " Apa bila terjadi kehilangan barang pada saat parkir di lokasi layanan parkir sebagaimana dalam Pasal 36 huruf e, menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir atau pengelola parkir untuk melakukan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama.

Melewati jalan demi jalan prihal klausula berisikan layanan yang diberikan yang tak disangka selalu ditemukan lain bukan yaitu berkenaan kesalahan berwujud uang yang dipugut ditemukan ketidaksesuaian apa yang dicantumkan di peraturan daerah. Kejadian terlintas cepat tanpa ketidakpedulian memunculkan ketidaktegasan dari Dinas Perumahan Daerah Parkir Kota Dasar persoalan pengawasan, lambat demi lambat akan terjadi anjloknya nilai dari kualitas pelayanan jasa parkir kepada masyarakat.

Dalam upaya sendiri dari dinas perhubungan kota Denpasar sudah memberikan informasi mengenai besarnya tarif pada kendaraan yang meliputi motor, mobil, dan bus atau truk. Dengan adanya informasi tersebut seharusnya bisa meminimalisir suatu tindak kecurangan dari petugas parkir tetapi kenyataannya berbanding terbalik dalam prakteknya. Wujud pentingnya pengelolaan perihal di transaksi jasa parkir perihal pencurahan keamanan fasilitas parkir yang dijalankan di tempat parkir. Siapapun tidak ingin sesuatu barang yang dimiliki terjadi hal yang tidak diinginkan terlebih mengganggu proses seseorang untuk dalam kegiatannya dalam transaksi jasa yang diberikan petugas parkir kepada pengguna jasa di area parkir. Diluar itu tidak ada harapan akan kejadian tersebut terjadi, kembali lagi pernyataan perihal tanggung jawab mengenai siapa yang bertanggung jawab terkait kendaraan bermotor yang hilang karena dicuri atau ada indikasi rusak di area parkir.

Mengenai praktek penyelenggaraan pengguna jasa parkir selaku konsumen di Kota Denpasar, perihal wujud konsumen dan kewajiban terdapat kewenangan sendiri dari pengelola parkir memunculkan perjanjian tak tersadar karena adanya sepakat dan sah dibalik pengguna jasa parkir selaku konsumen dengan pengelola parkir ketika berbenturan adanya suatu kondisi yang parkir mengakibatkan sebab terjadinya kesepakatan yang tidak disangka untuk pemenuhan persetujuan parkir atau telah dibayarkan uang sesuai bersamaan dengan karcis. Terparkirnya kendaraan yang membuat persetujuan kesepakatan dan kemudian dari konsumen mendapatkan karcis dan terjadi kehilangan kendaraan akan

memunculkan masalah baru karena konsumen berada di posisi yang lemah tanpa bukti untuk mengajukan ganti rugi maka dari itu perlu kesadaran dari konsumen akan hal yang dimiliki. Terlintas wujud pelaksanaan seperti itu jelas merugikan konsumen akan kondisi tempat parkir yang akan barang tidak akan terjaga dengan baik, menjadi kepatuhan bagi pengelola parkir untuk bertindak secara teliti, ketidakinginan tersebut menjadi bumerang yang membuat petugas melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan amanat yang diampuhnya, dibalik itu hukum menyertai dalam menjamin konsumen merasa nyaman dengan kepemilikan kendaraannya, secara tidak langsung pengelola parkir muncul tanggung jawab atas ketidakcermatan dalam hal sifat hati-hati pada barang yang ditiptkan.

Pada Januari 2024 hingga Juni 2024, ada sebanyak 11 pengaduan yang diterima di Perumda Bhukti Praja Swakadarma. Menurut Direktur Utama (Dirut) Perumda Bhukti Praja Sewakadarma mengatakan 6 pengaduan melalui Pro Denpasar, sementara 5 pengaduan lainnya melalui Nomor WhasApp pengaduan milik Perumda Bhukti Praja Sewakadarma yang dicantumkan dalam baju juru parkir. Jenis pengaduan terdiri dari 4 pengaduan menyangkut penerapan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan, 3 terkait layanan petugas parkir , lalu 1 terkait konsumen yang tidak diberikan karcis parkir, 1 kehilangan helm dan 2 terkait juru parkir liar. Pengaduan paling bayak adalah terkait tarif parkir.

Jika melihat pergerakan jaman mengenai pelaku usaha yang memberikan layanan terhadap perparkiran yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan oleh pengguna jasa parkir selaku konsumen karena

ketidakprofesional dalam berkerja di kegiatan parkir, yaitu dalam prospek wujud keamanan dan kenyamanan melihat dari sisi hukum mengenai sudut pandang perlindungan konsumen mengenai pelayanan parkir di kota Denpasar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN PARKIR DALAM PELAYANAN JASA PARKIR DI KOTA DENPASAR”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara pengelola parkir dengan pengguna jasa parkir selaku yang mengalami kerugian konsumen di Kota Denpasar?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir selaku konsumen yang mengalami kerugian di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah pada perlindungan hukum terhadap konsumen parkir dalam pelayanan parkir di Kota Denpasar meliputi beberapa aspek yang terkait dengan perlindungan hukum konsumen dalam penggunaan jasa parkir. Beberapa aspek ini termasuk:

1. Perjanjian Hukum : Meneliti apakah hubungan tersebut merupakan perjanjian penitipan barang atau sewa lahan.
2. Tanggung jawab Pengelolah: Mengkaji kewajiban pengelolah parkir dalam menjaga kendaraan dan memberikan ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan.
3. Kedudukan Hukum Konsumen: Meneliti hak dan kewajiban konsumen serta pengelolah parkir dalam konteks perjanjian.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
3. Sebagai syarat penyelesaian jenjang pendidikan strata 1 (S1) Di fakultas hukum Universitas Mahasaswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Penetapan Tanggung Jawab

Menentukan apakah pengelolah parkir bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengguna jasa parkir terutama jika

kerugian tersebut terjadi karena kelalaian atau ketidaktepatan pengelola dalam menyediakan layanan parkir yang aman dan terawat.

2. Ganti Rugi

Mentapkan apakah pengelola parkir harus memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pengguna yang mengalami kerugian, seperti pencurian kendaraan atau barang dari kendaraan di area parkir.

3. Batas Tanggung Jawab

Mengatur batasan-batasan tanggung jawab pengelola parkir dalam kontrak atau peraturan yang berlaku, termasuk pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat diminta oleh pengguna.

4. Perlindungan Hukum

Melindungi hak-hak hukum pengguna parkir dan memberikan mereka akses untuk menuntut ganti rugi atau perlindungan hukum yang lainnya jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola parkir.

5 . Perjanjian Kontrak

Memastikan bahwa hubungan hukum antara pengelola dan pengguna parkir diatur oleh perjanjian kontrak yang jelas dan dapat diterapkan untuk mengatasi sengketa atau klaim yang timbul dari kerugian.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan “ Suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai prespektif ilmu hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai prespeksi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang ddasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.⁶

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. penelitian empiris juga digunakan

⁵ Dr. Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, **Metode Penelitian Hukum: Doktrinan dan Non-Doktrin**, Cetakan 1, CV. Social Politik Genius, Makasar, Hlm.13.

⁶ Zaenudin Ali, 2010, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.14.

untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁷

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini di kota Denpasar dengan melihat dan mengamati secara langsung bagaimana perlindungan terhadap parkir dalam pelayanan parkir di Kota Denpasar.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan pendekatan peraturan Perundang-Undangan (statute apporoach), Penelitian ini melibatkan telaan terhadap Undang-Undang yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, seperti Undang-Undang yang mengatur perlindungan Hukum terhadap pelayanan parkir di Kota Denpasar. Adapun pendekatan fakta, pendekatan ini berfokus pada kenyataan yang ada dimasyarakat dan bagaimana peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Impelentasikan dalam praktek.

1.5.3 Sumber Data

Sumber penelitian akan diambil dari bahan sumber primer dan bahan sumber hukum skunder.

- a. Data primer

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hlm.280.

1. Wawancara : Peneliti melakukan wawancara langsung dengan responden, termasuk pengguna jasa parkir yang mengalami kerugian untuk mendapatkan data secara langsung.
 2. Observasi : Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu perlindungan hukum dan pertanggungjawaban dalam pengelola parkir terhadap kendaraan yang dikelola oleh PT parkir Denpasar.
 3. Kajian Perpustakaan : Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui literatur kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, seperti Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Kota Denpasar.
- b. Data Sekunder
1. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Parkiran
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 3. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pelayanan di Tepi Jalan Umum.
- c. Data Tersier
- Data tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk meupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier digunakan dalam skripsi dan Kamus yang

digunakan untuk mendefinisikan istilah-istilah hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada bagaian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengunpulkan sumber data baik data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik penelitian pengumpulan data primer dan data skunder yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah bertatap mukanya dalam peran itu bersituasai , ketika seorang yaitu pewawancara itu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kemudian dirancang dengan mengaitkan masalah yang akan dibahas untuk mempermudah memeproleh jawaban releven kepada Informan.⁸

Wawancara dikerjakan dengan wujud penjelasan secara lisan guna mencapai tujuan tersebut perolehan yaitu narasumber yang berkompeten memberikan informasi yang tepat dan akurat.⁹

b. Obsevasi

Observasi dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Denpasar ,Perusahaan Daerah parkir, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan beberapa tempat parkir di Kota Denpasar.

c. Dokumentasi

⁸ Amiruddin, **pengentar Metode Penelitian Hukum**, Hlm.82.

⁹ Burhan hshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Hlm.95.

Teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen.¹⁰ Perda Parkir dan Peraturan Wali Kota Denpasar.

1.5.5 Teknik Analisi Data

a. Analisis Deskriptif

1. Kondisi Parkir

Penelitian ini menggambarkan kondisi parkir di Kota Denpasar, termasuk keberadaan parkir liar yang tidak teratur, yang sering kali menyebabkan kerugian bagi konsumen parkir.

2. Persyaratan Ganti Rugi

Untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami, konsumen harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti melaporkan kehilangan segera dan mengumpulkan bukti.

Persyaratan yang sering kali sulit untuk dipenuhi oleh konsumen.

3. Kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memantau kendaraan mereka saat parkir dapat menyebabkan kehilangan. Hal

¹⁰ Sudarto, 2002, **Metodologi Penelitian Filsafat**, (Jakarta Raja Persada)

ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kesadaran konsumen juga penting dalam perlindungan hukum.

b. Analisis Kualitatif

1. Identifikasi Permasalahan Perlindungan Hukum

Analisis bagaimana hukum melindungi konsumen dari kerugian yang timbul akibat layanan parkir yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Kepatuhan terhadap Regulasi

Evaluasi bagaimana penyedia jasa parkir mematuhi atau melanggar regulasi yang ada.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Penyedia Jasa Parkir.

Investigasi hak-hak konsumen dalam pelayanan parkir dan kewajiban penyediaan jasa parkir. Ini termasuk bagaimana hak-hak tersebut dilindungi dalam praktik dan bagaimana konsumen dapat menuntut haknya jika terjadi pelanggaran.

UNMAS DENPASAR